

**PENDIDIKAN DAN SOSIALISASI POLITIK BAGI MASYARAKAT JORONG DATA
SUNGAI TALEH, NAGARI BARINGIN, KAB. AGAM*****POLITICAL EDUCATION AND SOCIALIZATION FOR THE COMMUNITY OF
JORONG DATA RIVER TALEH, NAGARI BARINGIN, AGAM DISTRICT*****Riko Riyanda¹⁾, Lara Indah Yandri²⁾, Khayriah³⁾, Didi Rahmadi⁴⁾, Tesha Dwi Puteri⁵⁾**¹²³⁴⁵ Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera BaratRiyanda.fisip@gmail.com, Laraindahyandri@gmail.com**ABSTRAK**

Sarana penting dalam rangka menciptakan pemilu yang demokratis adalah dengan memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Aspek tersebut menjadi sebuah kewajiban bagi Dosen Prodi Ilmu Politik UM Sumatera Barat melakukan pengabdian dengan tema sosialisasi “katakan tidak pada *money politic*” di saat pemilu dan pilkada. Pengabdian yang dilakukan kepada masyarakat dilakukan di Jorong Data Sungai Taleh, Nagari Baringin, Kecamatan Palembayan. Metode dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi. Tujuan pengabdian ini adalah selain untuk memberikan pencerahan politik kepada masyarakat akan bahaya *money politic* juga untuk mengukur sejauh mana pemahaman dan keterlibatan masyarakat ikut berpartisipasi pada pelaksanaan pemilu dan pilkada. Adapun materi dalam pengabdian ini adalah: Apa itu *money politic*, faktor penyebab dan pendorongnya, contoh *money politic* dan bagaimana membedakan dengan *cost politic* dan bagaimana pula cara menghindarinya. Hasil dari pengabdian ini: sosialisasi dan pendidikan politik sepenuhnya punya nilai manfaat bagi masyarakat untuk sama-sama mewujudkan pemilu yang demokratis. Masyarakat menyadari akan bahaya *money politic* di satu sisi, namun di sisi yang lain juga bagian dari pelaku penerima dari peserta pemilu. Kadang sulit untuk tidak terhindar karena alasan kebutuhan ekonomi. Setelah dijelaskan dampak dan akibatnya cukup memantik masyarakat dengan pertanyaan cara agar tidak terlibat dari pengaruh buruk *money politic* tersebut.

Kata kunci: sosialisasi politik, pendidikan politik, money politik, pemilu demokratis

ABSTRACT

An important means to create democratic elections is to provide political education to the public. This aspect becomes an obligation for Lecturers of the Political Science Study Program at UM West Sumatra to do service with the socialization theme of "say no to money politics" during elections and local elections. Community service is carried out in Jorong Data Sungai Taleh, Nagari Baringin, Palembayan District. The method is carried out by the lecture and discussion method. The purpose of this service is not only to provide political enlightenment to the community about the dangers of money politics but also to measure the extent to which the understanding and involvement of the community participates in the implementation of elections and local elections. The materials in this service are: What is money politics, the factors that cause and encourage it, examples of money politics and how to

distinguish it from cost politics and how to avoid it. The result of this service: socialization and political education have full value benefits for the community to jointly realize democratic elections. The public is aware of the dangers of money politics on the one hand, but on the other hand they are also part of the recipients of election participants. Sometimes it's hard not to be spared for reasons of economic necessity. After explaining the impact and consequences, it is enough to trigger the community by asking how not to get involved from the bad influence of money politics.

Keyword: political socialization, political education, money politics, democratic elections

A. PENDAHULUAN

Praktik politik uang terjadi dengan pola yang beragam dalam pilkades, pilkada, pemilu legislatif dan pemilu presiden. Hasil pemantauan transparansi International Indonesia (TII) dan *Indonesian Coorruption Watch* (ICW) menyimpulkan bahwa modus operandi politik uang dan pemilu berlangsung dengan pola-pola tertentu dan beragam. Praktiknya: (1) ada yang dilakukan dengan cara yang sangat luas, sehingga pada penerima uang tidak menyadari telah menerima uang sogokan, (2) ada juga dengan cara yang sangat mencolok (terang-terangan) di depan ribuan orang. Kondisi ini menurut laporan pemantauan TII dan ICW, seolah negara ini berdiri tanpa aturan hukum yang harus ditaati oleh setiaparganya.

Dari segi caranya, menurut Wahyudi Kumorotomo, pola politik uang dalam pilkada terjadi secara langsung dan secara tidak langsung. Pola langsung meliputi:

1. Pembayaran tunai dari tim sukses calon kepada konstituen potensial
2. Sumbangan dari bakal calon kepada parpol yang telah mendukungnya
3. Sumbangan wajib yang disyarakatkan oleh parpol kepada kader partai atau bakal calon yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Politik uang secara tidak langsung bisa berbentuk pembagian hadiah atau *doorproze*, sumbangan sembako kepada konstituen, pembagian semen di daerah pemilihan.

Berdasarkan aktor dan wilayah operasinya, Didik Suriyanto mengemukakan bahwa politik uang dalam pilkada dapat dibedakan menjadi empat lingkaran yaitu:

1. Lingkaran satu, transaksi antara elit ekonomi (pemilik uang) dengan paangan calon kepada daerah
2. Lingkaran dua, transaksi antara calon kepala daerah dengan partai politik yang mempunyai hak untuk mencalonkan
3. Lingkaran tiga, transaski antara pasangan calon dan tim kampanye dengan petugas-petugas pilkada yang mempunyai wewenang untuk menghitung perolehan suara, dan
4. Lingkaran empat, transaksi antara calon dan tim kampanye dengan massa pemilih (pembelian suara).

Keempat lingkaran tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain pemberian ongkos transportasi kampanye, janji membagi uang/barang, pembagian sembako atau semen untuk membangun tempat ibadah, serangan fajar, dan lain-lain. Menurut Didik Suprianto, politi uang lingkaran empat ini biasa disebut dengan *political buying* atau pemberian ongkos transportasi kampanye, janji membagi uang/barang, pembagian sembako atau semen untuk membangun tempat ibadah, serangan fajar dan lain-lain.

Modus politik uang tersebut berlangsung dari pemilu ke pemilu, tidak terkecuali dalam pilkada/pemilu dan praktik-praktik jual beli suara ini bukan semata-mata didasari oleh kebutuhan ekonomi sebagian besar pemilih, tetapi juga karena hal tersebut sudah lama berlangsung setiap kali ada

pemilihan (misalnya pilkades) sehingga masyarakat menganggapnya sebagai sesuatu yang lumrah, meski mereka tahu bahwa hal itu melanggar ketentuan. Namun berbagai kejadian politik uang dalam pilkada langsung seringkali tidak tersentuh oleh penegakan hukum karena sulitnya pembuktian akibat tidak adanya batasan yang jelas mengenai politik uang, di samping sebagian masyarakat menganggap sebagai sesuatu yang lumrah.

Koordinasi Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz menyebutkan sedikitnya ada lima ruang transaksional yang membuat biaya politik menjadi tinggi sepanjang proses pencalonan kepada daerah hingga pemilu terselenggara yaitu yang terjadi pada proses pra pencalonan, proses penentuan kandidat dan proses pasca pemilihan. Pada proses prapencalonan, ruang yang membuat biaya politik tinggi adalah mahar politik atau suap calon kepada partai politik di dalam penentuan kandidat. Selain mahar ada pula biaya survey untuk mengangkat elektabilitas pasangan calon kepala daerah pada tahap penentuan kandidat, biaya politik yang besar dikeluarkan untuk biaya atribut kampanye dan alat peraga.

Meski negara saat ini telah memberikan subsidi kampanye, sejumlah kandidat kepada kepala daerah tetap berkampanye dengan alat peraga yang dibiayai sendiri. Dalam level ini juga suap terhadap pemilih seringkali terjadi secara masif. Selain itu juga terjadi kepada pengandil perkara hasil pemilu, misalnya dalam proses sidang perkara hasil pilkada yang terjadi pada masa Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

Ramlan Surbakti mencatat bahwa peluang munculnya politik uang dalam pilkada dapat diidentifikasi sejak awal, yakni pertama, untuk dapat menjadi calon diperlukan “sewa perahu”, baik yang dibayar sebelum atau setelah penetapan calon, sebagian atau seluruhnya. Jumlah sewa yang harus dibayar diperkirakan cukup besar jauh melampaui batas sumbangan dana kampanye yang ditetapkan dalam undang-undang, tetapi tidak diketahui dengan pasti karena berlangsung di balik layar. Kedua, calon yang diperkirakan mendapat dukungan kuat, biasanya *incumbent*, akan menerima dana yang sangat besar dari kalangan pengusaha yang memiliki kepentingan ekonomi di daerah tersebut.

Dengan mencerminkan kondisi di atas maka penting untuk melakukan pengabdian dalam rangka mencerdaskan pemilih dengan melaksanakan edukasi politik tentang bahaya money politik. Dalam hal ini sasarannya adalah masyarakat Jorong Data Sungai Taleh, Nagari Baringin, Kecamatan Palembang.

B. PELAKSANAAN DAN METODE

Pelaksana acara kegiatan dilakukan secara dialog dalam bentuk diskusi dengan judul edukasi politik warga masyarakat dengan tema korupsi dalam pemilu. Pelaksana kegiatan ini adalah masyarakat Jorong Data Sungai Taleh dan mahasiswa KKN.

Rangkaian kegiatan sebelum kegiatan pengabdian di mulai, pengabdi akan mengumpulkan peserta masyarakat Jorong Data Sungai Taleh di ruangan mesjid, kemudian memberikan pemahaman dan wawasan tentang edukasi politik dalam pemilu. Tim pengabdi memberikan ceramah berbentuk sosialisasi dan pendidikan politik berupa materi tentang korupsi politik dalam pemilu (pilkada). Untuk memastikan bahwa peserta paham dengan materi yang disampaikan, maka tim pengabdi memberikan waktu untuk berdiskusi dan tanya jawab.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan melihat umpan balik (*feed back*) dari peserta pembinaan dengan menanyakannya secara langsung apakah masyarakat dan mahasiswa KKN memahami tentang korupsi politik dan money politis dan lain sebagainya. Adapun pertanyaan yang dinyampai oleh masyarakat antara lain:

1. Apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk mencegah politik uang?
2. Apa beda politik uang dengan biaya kampanye atau ongkos politik?

3. Apakah sumbangan ke mesdid itu merupakan bagaian dari politik uang?
4. Lebih buruk mana pemerintah sekrang dibandingkan dengan pemerintah sebelumnya soal politik uang?
5. Apa media sosial sekarang berperan dalam edukasi politik dalam mencegah politik uang?

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Apa yang terjadi dari setiap pemilu ataupun pilkada seperi tidak lepas dari yang namanya korupsi politik. Apa yang kami sampaikan selama pengabdian ini mencerminkan juga apa yang terjadi pada masyarakat selama pilkada. Sepertinya masyarakat memang sulit membedakan mana yang termasuk money politik dan mana yang termasuk “sedekah”. Namun juga ada beberapa kelompok masyarakat yang secara sadar menerima bantuan selama pemilu karena memang merasa membutuhkan. Fakor ekonomi menjadi alasan mereka menerima bantuan tersebut walaupun malu untuk mengakuinya.

Faktor lainnya penyebab korupsi politik itu tidak bisa dipisahkan dengan keinginan dari masyarakat itu sendiri. Antara masyarakat dan politisi saling membutuhkan satu sama lainnya (*simbiosis mutualisme*) sehingga sulit untuk menghindari bantuan ekonomi tersebut. Menurut kami, praktik politik uang masih akan massif terus terjadi, mana kala masyarakat hanya ingin memperoleh kepentingan sesaat dan berpikir jangka pendek, dan faktor ini juga berbanding lurus disaat masyarakat belum memahami Pendidikan politik itu dalam arti yang sebenarnya. Karena itulah korupsi politik itu terjadi, hal ini disebabkan karena latar pendidikan dan ekonomi yang tidak merata di kalangan masyarakat.

D. PENUTUP

Adapun saran-saran yang diberikan yakni:

1. Koordinasi yang baik sangat diperlukan agar sebuah kegiatan dapat berjalan sesuai perencanaan dan tujuan yang ditetapkan.
2. Kerjasama tim adalah kunci keberhasilan suatu kegiatan tanpa menghilangkan tanggungjawab yang telah ditugaskan.
3. Diharapkan setelah sosiliasasai dan pengabdian mayarakat tentang korupsi politik ini, diharapkan partsipasi aktif warga untuk melaporkan kecurangan kerpada panwaslu yng diduga melakukan prkatik korupsi politik

E. DAFTAR PUSTAKA

Hamidi, Ahsan Jamet et al., 2008. *Pemilu Tidak Bebas Politik Uang*, Jakarta : Transparency International Indonesia

Kumorotomo, Wahyudi. Intervensi Parpol, Politik Uang dan Korupsi, Tantangan Kebijakan Publik Setelah Pilkada Langsung, 2009. Makalah, Surabaya: disajikan dalam konferensi administrasi negara

Supriyanto, Didik Transkrip Diskusi Publik Terbatas, (*ijrsh.files.wordpress.com/2008/06/politikuang-dalam-pilkada.pdf*, diakses, 8 September 2021)

Kompas.com,, 31 Maret 2016. *Politik uang terjadi dalam pilkada.*